**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA
KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI**

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dalam implementasinya perlu dioptimalkan.

Dalam upaya optimalisasi peran gubernur sebagai wakil Pemerintah khususnya dalam rangka meningkatkan sinergitas pusat dan daerah, perlu adanya pengaturan untuk meningkatkan sinergi pusat serta daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dengan substansi pengaturan antara lain meliputi:

- a. Pengayaan konsepsi dan definisi operasional dari koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- b. Perbaikan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang dengan memperkuat rapat kerja, termasuk sanksi dan sinkronisasi program/kegiatan.
- c. Memperjelas peran gubernur dalam keikutsertaannya membahas program-program yang akan dilimpahkan oleh Pemerintah kepada gubernur maupun yang akan ditugaspembantuankan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- d. Memperjelas fungsi dan peran kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris gubernur, yang pengaturan lebih lanjutnya akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.